

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KULON PROGO

NOMOR 53 TAHUN 2012

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2011-2016

A. IKU PEMERINTAH DAERAH

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)		SATUAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya tingkat pendidikan dan keterampilan penduduk	1.	Angka Partisipasi Murni PAUD	persen	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
		2.	Angka Partisipasi Kasar PAUD	persen	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
		3.	Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Dasar SD/MI	persen	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
		4.	Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Dasar SMP/MTS	persen	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
		5.	Angka Partisipasi Murni Pendidikan Dasar SD/MI	persen	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
		6.	Angka Partisipasi Murni Pendidikan Dasar SMP/MTS	persen	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
		7.	Angka Partisipasi Kasar Inklusi Pendidikan Dasar SD/MI	persen	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
		8.	Angka Partisipasi Kasar Inklusi Pendidikan Dasar SMP/MTS	persen	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
		9.	Angka Partisipasi Murni Inklusi Pendidikan Dasar SD/MI	persen	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
		10.	Angka Partisipasi Murni Inklusi Pendidikan Dasar SMP/MTS	persen	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
		11.	Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Menengah	persen	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan

	12.	Angka Partisipasi Murni Pendidikan Menengah	persen	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
	13.	Angka Partisipasi Kasar Inklusi Pendidikan Menengah	persen	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
	14.	Angka Partisipasi Murni Inklusi Pendidikan Menengah	persen	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
	15.	Angka melek huruf penduduk yang berusia >15 tahun (tidak buta aksara)	persen	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
	16.	Rasio buku yang dipinjam per pengunjung	persen	Kantor Perpustakaan dan Arsip	Kantor Perpustakaan dan Arsip
	17.	Cakupan pelayanan perpustakaan kabupaten	persen	Kantor Perpustakaan dan Arsip	Kantor Perpustakaan dan Arsip
	18.	Koleksi buku yang tersedia di Perpustakaan	buah	Kantor Perpustakaan dan Arsip	Kantor Perpustakaan dan Arsip
	19.	Jumlah Pengunjung perpustakaan per tahun.	orang	Kantor Perpustakaan dan Arsip	Kantor Perpustakaan dan Arsip
	20.	Rasio ketersediaan PAUD per penduduk usia 0-6 tahun	persen	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
	21.	Angka kelulusan (SD/MI, SMP/MTS)	persen	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
	22.	Angka melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTS	persen	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
	23.	Angka putus sekolah (SD/MI, SMP/MTS)	persen	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
	24.	Rasio Guru/ Murid (SD/MI, SMP/MTS)	persen	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
	25.	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah (SD/MI, SMP/MTS, Sekolah Pendidikan)	persen	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
	26.	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	persen	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
	27.	Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	persen	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan

	28.	Tersedianya satuan pendidikan SD/MI dalam jarak paling jauh 3 km dengan berjalan kaki dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil	persen	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
	29.	Tersedianya satuan pendidikan SMP/MTS dalam jarak paling jauh 6 km berjalan kaki dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil	persen	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
	30.	Memiliki 2 (dua) orang guru SD/MI yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D IV	persen	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
	31.	Memiliki 2 (dua) orang guru SD/MI yang memiliki sertifikat pendidikan	persen	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
	32.	Memiliki guru SMP/MTS yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D IV sebanyak 70 % (40% untuk daerah khusus)	persen	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
	33.	Memiliki guru SMP/MTS yang memiliki sertifikat pendidik sebanyak separuh diantaranya dan untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 50%	persen	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
	34.	Di setiap SMP/MTS tersedia guru dengan kualifikasi akademik s1 atau D IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing 1 (satu) orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris.	persen	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
	35.	Angka kelulusan SMA/MA	persen	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
	36.	Angka melanjutkan dari SMP/MTS ke SMA/MA/SMK	persen	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
	37.	Angka putus sekolah SMA/MA/SMK	persen	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan

		38.	Rasio guru/murid SMA/MA/SMK	persen	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
		39.	Sekolah pendidikan SMA/MA/SMK kondisi bangunan baik	persen	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
2.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	40.	Usia harapan hidup	Tahun	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
		41.	Angka Kematian Ibu	persen	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
		42.	Angka Kematian bayi per 1000 kelahiran hidup		Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
		43.	Prevalensi gizi buruk	persen	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
		44.	Angka Kematian Balita per 1000 balita		Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
		45.	Pelayanan Gawat Darurat level 1 yang harus diberikan Sarana Kes (RS) di Kab/Kota	persen	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
		46.	Cakupan desa yang mengalami penyelidikan epidemiologi/ KLB <24 jam	persen	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
		47.	Desa Siaga aktif	persen	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
		48.	Rasio akseptor KB	persen	Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa Perempuan dan Keluarga Berencana	Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa Perempuan dan Keluarga Berencana
		49.	Cakupan peserta KB aktif	persen	Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa Perempuan dan Keluarga Berencana	Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa Perempuan dan Keluarga Berencana
		50.	Cakupan masyarakat mendapat jaminan pelayanan kesehatan	persen	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
		51.	Puskesmas melaksanakan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat	persen	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
		52.	Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	persen	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan

		53.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit :			
			a. Penemuan kasus Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk < 15 tahun	persen	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
			b. Penemuan Pneumonia Balita	persen	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
			c. Penemuan Pasien baru BTA positif	persen	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
			d. Penderita DBD yang ditangani	persen	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
			e. Penemuan penderita diare	persen	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
		54.	Cakupan ibu hamil K4	persen	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
		55.	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	persen	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
		56.	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	persen	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
		57.	Cakupan pelayanan nifas	persen	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
		58.	Cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani	persen	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
		59.	Cakupan kunjungan bayi	persen	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
		60.	Cakupan pelayanan anak balita	persen	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
		61.	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin	persen	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
		62.	Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	persen	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
		63.	BOR (Bed operation rate)	persen	Rumah Sakit Umum Daerah Wates	Rumah Sakit Umum Daerah Wates
		64.	LOS (Length of stay)	persen	Rumah Sakit Umum Daerah Wates	Rumah Sakit Umum Daerah Wates
		65.	TOI (Turn over interval)	persen	Rumah Sakit Umum Daerah Wates	Rumah Sakit Umum Daerah Wates
		66.	GDR	persen	Rumah Sakit Umum Daerah Wates	Rumah Sakit Umum Daerah Wates
		67.	NDR	persen	Rumah Sakit Umum Daerah Wates	Rumah Sakit Umum Daerah Wates

	68.	Rasio tempat tidur kelas III	persen	Rumah Sakit Umum Daerah Wates	Rumah Sakit Umum Daerah Wates
	69.	Pemanfaatan TT (BOR) kelas III	persen	Rumah Sakit Umum Daerah Wates	Rumah Sakit Umum Daerah Wates
	70.	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya di bawah usia 20 tahun	persen	Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa Perempuan dan Keluarga Berencana	Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa Perempuan dan Keluarga Berencana
	71.	Cakupan sasaran PUS menjadi menjadi peserta KB aktif	persen	Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa Perempuan dan Keluarga Berencana	Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa Perempuan dan Keluarga Berencana
	72.	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	persen	Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa Perempuan dan Keluarga Berencana	Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa Perempuan dan Keluarga Berencana
	73.	Cakupan PUS peserta KB anggota UPPKS yang ber KB mandiri	persen	Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa Perempuan dan Keluarga Berencana	Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa Perempuan dan Keluarga Berencana
	74.	Jumlah akseptor KB mandiri	persen	Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa Perempuan dan Keluarga Berencana	Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa Perempuan dan Keluarga Berencana
	75.	Jumlah posyandu aktif	unit	Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa Perempuan dan Keluarga Berencana	Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa Perempuan dan Keluarga Berencana
	76.	Cakupan pelayanan kesehatan usia lanjut	persen	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
	77.	Cakupan masyarakat miskin mendapat jaminan pelayanan kesehatan	persen	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
	78.	Jumlah desa yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	persen	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan

3.	Terjaminnya keadilan gender dan perlindungan perempuan dan anak	79.	IPG (Indeks Pembangunan Gender)		Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa Perempuan dan Keluarga Berencana	Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa Perempuan dan Keluarga Berencana
		80.	IDG (Indeks Pemberdayaan Gender)		Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa Perempuan dan Keluarga Berencana	Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa Perempuan dan Keluarga Berencana
		81.	Partisipasi angkatan kerja perempuan	persen	Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa Perempuan dan Keluarga Berencana	Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa Perempuan dan Keluarga Berencana
		82.	Angka melek huruf perempuan usia 15 tahun ke atas	persen	Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa Perempuan dan Keluarga Berencana	Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa Perempuan dan Keluarga Berencana
		83.	Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	persen	Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa Perempuan dan Keluarga Berencana	Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa Perempuan dan Keluarga Berencana
		84.	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	persen	Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa Perempuan dan Keluarga Berencana	Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa Perempuan dan Keluarga Berencana
		85.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam UPT	persen	Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa Perempuan dan Keluarga Berencana	Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa Perempuan dan Keluarga Berencana
		86.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana kekerasan terhadap perempuan atau anak dan pusat pelayanan terpadu/pusat krisis terpadu di rumah sakit	persen	Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa Perempuan dan Keluarga Berencana	Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa Perempuan dan Keluarga Berencana

		87.	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di UPT	persen	Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa Perempuan dan Keluarga Berencana	Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa Perempuan dan Keluarga Berencana
		88.	Cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di UPT	persen	Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa Perempuan dan Keluarga Berencana	Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa Perempuan dan Keluarga Berencana
		89.	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	persen	Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa Perempuan dan Keluarga Berencana	Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa Perempuan dan Keluarga Berencana
		90.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	persen	Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa Perempuan dan Keluarga Berencana	Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa Perempuan dan Keluarga Berencana
		91.	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	persen	Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa Perempuan dan Keluarga Berencana	Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa Perempuan dan Keluarga Berencana
		92.	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	persen	Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa Perempuan dan Keluarga Berencana	Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa Perempuan dan Keluarga Berencana
4.	Terciptanya peningkatan jaminan kesejahteraan sosial	93.	Rasio PMKS yang mendapat pelayanan dan jaminan kesejahteraan sosial	persen	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		94.	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	persen	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		95.	Persentase penyandang cacat fisik dan mental serta lansia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	persen	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		96.	Persentase penyandang cacat dan eks trauma yang mendapat pembinaan	persen	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

		97.	Persentase eks penyandang penyakit sosial, eks narapidana, eks narkoba dan penyakit sosial lainnya yang mendapat pembinaan	persen	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		98.	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama tanggap darurat	persen	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		99.	Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	persen	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		100.	Persentase perusahaan yang berperan serta dalam peningkatan kesejahteraan sosial	persen	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		101.	Persentase panti sosial skala Kabupaten yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	persen	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
5.	Terciptanya masyarakat yang berdaya secara ekonomi, sosial, budaya dan politis	102.	Keluarga Sejahtera dan Keluarga Pra Sejahtera I (prosentase keluarga sejahtera dari seluruh jumlah keluarga)	KK/persen	Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa Perempuan dan Keluarga Berencana	Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa Perempuan dan Keluarga Berencana
		103.	Jumlah penempatan transmigran	KK	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
6.	Terwujudnya kualitas kehidupan beragama inter dan antar agama	104.	Forum dialog antar umat beragama	kali	Bagian Administrasi, Kesra dan Kemasyarakatan	Bagian Administrasi, Kesra dan Kemasyarakatan
		105.	Konflik umat beragama	kali	Bagian Administrasi, Kesra dan Kemasyarakatan	Bagian Administrasi, Kesra dan Kemasyarakatan

7.	Terciptanya iklim ketenagakerjaan yang dapat meningkatkan kesempatan kerja dan peluang kerja untuk menurunkan angka pengangguran	106.	Penurunan pengangguran	persen	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		107.	Tingkat partisipasi angkatan kerja	persen	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		108.	Besaran pencari kerja yang ditempatkan	persen	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		109.	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	persen	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		110.	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	persen	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		111.	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program jamsostek	persen	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		112.	Besaran pemeriksaan perusahaan	persen	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		113.	Besaran pengujian peralatan di perusahaan	persen	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		114.	Persentase perusahaan yang memiliki P2K3 (Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja)	persen	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		115.	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	persen	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		116.	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	persen	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		117.	Rasio Ketergantungan	persen	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
8.	Terpeliharanya aset-aset budaya dan pengembangan nilai-nilai budaya	118.	Capaian pelestarian seni budaya daerah	kelompok	Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga	Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga
		119.	Capaian pelestarian BCB dan KCB	persen	Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga	Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga
		120.	Cakupan kajian seni	persen	Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga	Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga

		121.	Cakupan Sumber Daya Manusia seni	persen	Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga	Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga
		122.	Cakupan Tempat	persen	Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga	Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga
		123.	Perlindungan hak cipta seni budaya	unit	Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga	Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga
		124.	Cakupan Fasilitas Seni	persen	Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga	Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga
		125.	Cakupan Gelar Seni	persen	Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga	Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga
9.	Meningkatnya prestasi kepemudaan dan keolahragaan	126.	Keikutsertaan pemuda dalam kegiatan skala regional dan nasional	orang	Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga	Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga
		127.	Keikutsertaan Cabor dalam event kejuaraan	cabor	Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga	Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga
		128.	Jumlah sarana dan prasarana olah raga yang memadai	unit	Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga	Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga
10.	Terwujudnya efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan	129.	Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian yang disusun	dokumen	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		130.	kesesuaian program RPJMD dengan RKPD	persen	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		131.	Jumlah unit kerja yang arsipnya terkelola sesuai standar	Unit	Kantor Perpustakaan dan Arsip	Kantor Perpustakaan dan Arsip
		132.	Pembangunan/ pengembangan e-government		Bagian Teknologi Informasi dan Humas	Bagian Teknologi Informasi dan Humas

	133.	- Website pemda	situs	Bagian Teknologi Informasi dan Humas	Bagian Teknologi Informasi dan Humas
	134.	- Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)	unit	Bagian Teknologi Informasi dan Humas	Bagian Teknologi Informasi dan Humas
	135.	Terisinya aparatur desa		Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa Perempuan dan Keluarga Berencana	Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa Perempuan dan Keluarga Berencana
		a. Kepala Desa	Jabatan	Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa Perempuan dan Keluarga Berencana	Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa Perempuan dan Keluarga Berencana
		b. Perangkat Desa	Jabatan	Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa Perempuan dan Keluarga Berencana	Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa Perempuan dan Keluarga Berencana
		c. BPD	Jabatan	Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa Perempuan dan Keluarga Berencana	Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa Perempuan dan Keluarga Berencana
	136.	Jumlah kerja sama antar daerah	Buah	Bagian Administrasi Pemerintahan Umum	Bagian Administrasi Pemerintahan Umum
	137.	Koordinasi Forkorpimda dan pejabat daerah	Kali	Bagian Administrasi Pemerintahan Umum	Bagian Administrasi Pemerintahan Umum
	138.	Pengadaan barang dan jasa melalui ULP	Persen	Bagian Administrasi Pembangunan	Bagian Administrasi Pembangunan
	139.	Pembahasan Raperda	Kali/Raperda	Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD
	140.	Kesesuaian jumlah SKPD sesuai peraturan yang berlaku	Persen	Bagian Organisasi	Bagian Organisasi
	141.	Keberadaan uraian tugas pada SKPD	Persen	Bagian Organisasi	Bagian Organisasi
	142.	Keberadaan Standar Pelayanan Publik pada SKPD penyelenggara layanan	Persen	Bagian Organisasi	Bagian Organisasi
	143.	Keberadaan Survey Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat pada SKPD penyelenggara layanan	Unit	Bagian Organisasi	Bagian Organisasi
	144.	Jumlah sistem informasi pemerintah daerah	Buah	Bagian Teknologi Informasi dan Humas	Bagian Teknologi Informasi dan Humas

11.	Terwujudnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan	145.	Keberadaan media informasi pemerintah daerah (website, papan informasi, brosur/leaflet)	Buah	Bagian Teknologi Informasi dan Humas	Bagian Teknologi Informasi dan Humas
		146.	Keberadaan jaringan internet pada SKPD dan area publik	Buah	Bagian Teknologi Informasi dan Humas	Bagian Teknologi Informasi dan Humas
		147.	ketepatan waktu penyampaian Laporan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah			
			a. LKPJ	Tepat/tidak	Bagian Administrasi Pemerintahan Umum	Bagian Administrasi Pemerintahan Umum
			b. LPPD	Tepat/tidak	Bagian Administrasi Pemerintahan Umum	Bagian Administrasi Pemerintahan Umum
			c. ILPPD	Tepat/tidak	Bagian Administrasi Pemerintahan Umum	Bagian Administrasi Pemerintahan Umum
		148.	ketepatan waktu penyampaian LAKIP	dokumen	Bagian Organisasi	Bagian Organisasi
12.	Terwujudnya sumberdaya aparatur yang profesional dan kompeten	149.	Jumlah PNS yang mengikuti program peningkatan dan profesionalisme	orang	Badan Kepegawaian Daerah	Badan Kepegawaian Daerah
		150.	Jumlah Tingkat pendidikan dan kompetensi aparatur	orang	Badan Kepegawaian Daerah	Badan Kepegawaian Daerah
		151.	Jumlah Penanganan Kasus Indisipliner	orang	Badan Kepegawaian Daerah	Badan Kepegawaian Daerah
		152.	Database pegawai	orang	Badan Kepegawaian Daerah	Badan Kepegawaian Daerah
		153.	Tingkat kesesuaian kualifikasi pegawai dengan kualifikasi jabatan	persen	Badan Kepegawaian Daerah	Badan Kepegawaian Daerah
			a. diklat pim			
			b. pendidikan			
		154.	Tingkat pemenuhan kebutuhan pegawai	persen	Badan Kepegawaian Daerah	Badan Kepegawaian Daerah

13.	Meningkatnya kemampuan pengelolaan keuangan dan aset daerah	155.	Jumlah/ persentase kenaikan Pendapatan Asli Daerah (jutaan rupiah)	rupiah/ persentase kenaikan	Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Asset	Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Asset
		156.	Tersusunnya/ Tersedianya Perda/Perbub tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	dokumen	Bagian Keuangan	Bagian Keuangan
		157.	Capaian realisasi target PAD	persen	Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Asset	Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Asset
		158.	Ketepatan waktu penetapan APBD		Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Asset	Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Asset
		159.	Tersusunnya juklak, pedoman, standar, sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah	dokumen	Bagian Keuangan	Bagian Keuangan
		160.	Opini BPK atas LKPD	Disclaimer/WDP/WTP	Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Asset	Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Asset
14.	Peningkatan pendapatan petani, peternak, nelayan, pembudidaya ikan dan pengolah produk pertanian, kelautan dan perikanan.	161.	Ketersediaan pangan energi	3.188 kkalori/kpt/hr	Kantor Ketahanan Pangan Dan Penyuluhan Pertanian Perikanan Kehutanan	Kantor Ketahanan Pangan Dan Penyuluhan Pertanian Perikanan Kehutanan
		162.	Ketersediaan pangan protein	146 gram/kpt/hr	Kantor Ketahanan Pangan Dan Penyuluhan Pertanian Perikanan Kehutanan	Kantor Ketahanan Pangan Dan Penyuluhan Pertanian Perikanan Kehutanan
		163.	Peningkatan nilai tukar petani	persen	Kantor Ketahanan Pangan Dan Penyuluhan Pertanian Perikanan Kehutanan	Kantor Ketahanan Pangan Dan Penyuluhan Pertanian Perikanan Kehutanan
		164.	Cadangan pangan pemerintah (Bulog)	ton	Kantor Ketahanan Pangan Dan Penyuluhan Pertanian Perikanan Kehutanan	Kantor Ketahanan Pangan Dan Penyuluhan Pertanian Perikanan Kehutanan

	165.	Cadangan pangan masyarakat (lumbung pangan)	ton	Kantor Ketahanan Pangan Dan Penyuluhan Pertanian Perikanan Kehutanan	Kantor Ketahanan Pangan Dan Penyuluhan Pertanian Perikanan Kehutanan
	166.	Penanganan daerah rawan pangan	desa	Kantor Ketahanan Pangan Dan Penyuluhan Pertanian Perikanan Kehutanan	Kantor Ketahanan Pangan Dan Penyuluhan Pertanian Perikanan Kehutanan
	167.	Ketersediaan informasi pasokan, harga, dan akses pangan	persen	Kantor Ketahanan Pangan Dan Penyuluhan Pertanian Perikanan Kehutanan	Kantor Ketahanan Pangan Dan Penyuluhan Pertanian Perikanan Kehutanan
	168.	Pola pangan harapan		Kantor Ketahanan Pangan Dan Penyuluhan Pertanian Perikanan Kehutanan	Kantor Ketahanan Pangan Dan Penyuluhan Pertanian Perikanan Kehutanan
	169.	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	persen	Kantor Ketahanan Pangan Dan Penyuluhan Pertanian Perikanan Kehutanan	Kantor Ketahanan Pangan Dan Penyuluhan Pertanian Perikanan Kehutanan
	170.	Kelas kelompok tani	kelompok	Dinas Pertanian dan Kehutanan	Dinas Pertanian dan Kehutanan
		a. pemula			
		b. lanjut			
		c. madya			
		d. utama			
	171.	Partisipasi petani dalam kelembagaan kelompok tani	persen	Dinas Pertanian dan Kehutanan	Dinas Pertanian dan Kehutanan
	172.	Produktivitas padi	Kuintal/hektar	Dinas Pertanian dan Kehutanan	Dinas Pertanian dan Kehutanan
	173.	Produksi padi dan palawija	ton	Dinas Pertanian dan Kehutanan	Dinas Pertanian dan Kehutanan
	174.	Produksi sayuran dan buah-buahan semusim	ton	Dinas Pertanian dan Kehutanan	Dinas Pertanian dan Kehutanan
	175.	Produksi buah dan sayuran tahunan	ton	Dinas Pertanian dan Kehutanan	Dinas Pertanian dan Kehutanan

		176.	Produksi tanaman obat	ton	Dinas Pertanian dan Kehutanan	Dinas Pertanian dan Kehutanan
		177.	Produksi perkebunan	ton	Dinas Pertanian dan Kehutanan	Dinas Pertanian dan Kehutanan
		178.	Produksi daging	kg	Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan	Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan
		179.	Produksi telur	kg	Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan	Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan
		180.	Produksi susu	liter	Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan	Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan
		181.	Tingkat konsumsi protein hewani	gr/kap/hr	Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan	Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan
		182.	Populasi ternak besar	ekor	Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan	Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan
		183.	Populasi ternak kecil dan aneka ternak	ekor	Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan	Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan
		184.	Populasi ternak unggas	ekor	Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan	Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan
		185.	Pelayanan kesehatan hewan	kali	Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan	Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan
		186.	Produksi perikanan budidaya	kg	Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan	Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan
		187.	Produksi benih ikan	ekor	Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan	Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan

		188.	Produksi perikanan tangkap	kg	Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan	Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan
		189.	Tingkat konsumsi makan ikan	kg/kap/tahun	Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan	Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan
15.	Meningkatnya pola dan kualitas pengelolaan hutan rakyat yang dapat meningkatkan produktifitas lahan	190.	Produksi kayu bulat	m3	Dinas Pertanian dan Kehutanan	Dinas Pertanian dan Kehutanan
		191.	Produksi kayu olahan primer	m3	Dinas Pertanian dan Kehutanan	Dinas Pertanian dan Kehutanan
16	Meningkatnya produksi industri yang berdaya saing tinggi	192.	Pertumbuhan usaha	persen	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
		193.	Peningkatan kapasitas kelompok usaha industri (unit usaha)	unit usaha	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
		194.	Pertumbuhan industri	persen	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
	Meningkatnya kontribusi usaha perdagangan	195.	peningkatan layanan perijinan usaha perdagangan (ijin)	buah	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
		196.	Peningkatan pelayanan dan pengendalian perijinan penggunaan sarana prasarana pasar	buah	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
		197.	Peningkatan pembinaan dan pengawasan peredaran barang dan jasa	Kecamatan	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM

18.	Meningkatnya nilai dan volume ekspor	198.	jumlah negara tujuan	negara	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
		199.	Peningkatan nilai ekspor	US \$	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
19.	Meningkatnya produktivitas, efisiensi, jumlah dan daya saing usaha kecil, rumah tangga, kecil/ menengah dan koperasi	200.	Peningkatan jumlah UMKM	unit	Dinas Koperasi dan UMKM	Dinas Koperasi dan UMKM
		201.	Meningkatnya jumlah koperasi sehat	unit	Dinas Koperasi dan UMKM	Dinas Koperasi dan UMKM
		202.	LKM Binangun yang sehat	persen	Bagian Administrasi Perekonomian	Bagian Administrasi Perekonomian
		203.	BUMD yang sehat	persen	Bagian Administrasi Perekonomian	Bagian Administrasi Perekonomian
		204.	BUMD berkontribusi positif terhadap PAD	persen	Bagian Administrasi Perekonomian	Bagian Administrasi Perekonomian
		205.	Koperasi sehat	persen	Dinas Koperasi dan UMKM	Dinas Koperasi dan UMKM
		206.	Terselenggaranya promosi peluang penanaman modal Kabupaten/Kota	kali/tahun	Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu.	Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu.
		207.	Terselenggaranya pelayanan perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang pendaftaran penanaman modal dalam negeri, izin prinsip penanaman modal dalam negeri, izin usaha penanaman modal dalam negeri, tanda daftar perusahaan (TDP), surat izin usaha perdagangan (SIUP), perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing (IMTA) yang bekerja di Kabupaten sesuai kewenangan Pemerintah Kabupaten	persen	Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu.	Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu.

		208.	Terselenggaranya bimbingan pelaksanaan kegiatan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha	kali/tahun	Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu.	Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu.
		209.	Terimplementasikannya sistem pelayanan informasi dan perizinan investasi secara elektronik	persen	Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu.	Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu.
		210.	Terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha	kali/tahun	Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu.	Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu.
		211.	Tersedianya informasi peluang usaha sektor/ bidang usaha unggulan	kali/bidang/tahun	Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu.	Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu.
20.	Meningkatnya realisasi investasi	212.	Peningkatan realisasi nilai investasi	persen	Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu.	Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu.
		213.	Peningkatan jumlah investor	persen	Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu.	Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu.
21.	Meningkatnya kunjungan wisata	214.	Jumlah kunjungan wisatawan	wisatawan	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
		215.	Peningkatan PAD retribusi pariwisata	Rupiah	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga

22.	Meningkatnya pelayanan pelayanan infrastruktur yang mendukung pengembangan wilayah	216.	Pusat kegiatan dapat dijangkau kendaraan roda 4 (%)	persen	Dinas Pekerjaan Umum	Dinas Pekerjaan Umum
		217.	Rasio panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (%)	persen	Dinas Pekerjaan Umum	Dinas Pekerjaan Umum
		218.	Tersedianya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam Kabupaten	persen	Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi	Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi
		219.	Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guardrail) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan kabupaten	persen	Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi	Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi
		220.	Berfungsinya pemeliharaan kelengkapan jalan (rambu lalu lintas, RPPJ, marka jalan, guardrail) (unit)	buah	Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi	Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi
		221.	Berfungsinya LPJU (titik)	buah	Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi	Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi
		222.	Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan Kabupaten/Kota	persen	Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi	Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi
		223.	Tersedianya angkutan umum yang melayani jaringan trayek yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah tersedia jaringan jalan Kabupaten	persen	Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi	Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi
		224.	Rasio saluran drainase pengairan dalam kondisi baik (%)	persen	Dinas Pekerjaan Umum	Dinas Pekerjaan Umum
		225.	Rasio Jaringan Irigasi (Panjang per luas daerah irigasi) (%)	persen	Dinas Pekerjaan Umum	Dinas Pekerjaan Umum
		226.	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik (%)	persen	Dinas Pekerjaan Umum	Dinas Pekerjaan Umum
		227.	Menurunnya jumlah rumah tidak layak huni (satuan angka)	buah	Dinas Pekerjaan Umum	Dinas Pekerjaan Umum

		228.	Meningkatnya persentase rumah tangga berakses air bersih (%)	persen	Dinas Pekerjaan Umum	Dinas Pekerjaan Umum
23.	Menurunnya kerusakan sumberdaya lahan	229.	Luas hutan rakyat (ha)	ha	Dinas Pertanian dan Kehutanan	Dinas Pertanian dan Kehutanan
		230.	Populasi tanaman kayu (btg)	batang	Dinas Pertanian dan Kehutanan	Dinas Pertanian dan Kehutanan
		231.	Luas lahan kritis (ha)	ha	Dinas Pertanian dan Kehutanan	Dinas Pertanian dan Kehutanan
		232.	Kerusakan kawasan hutan	persen	Dinas Pertanian dan Kehutanan	Dinas Pertanian dan Kehutanan
24.	Terjaganya lingkungan kawasan pesisir	233.	Penanaman tanaman penahan bencana alam laut (batang)	batang	Kantor Lingkungan Hidup	Kantor Lingkungan Hidup
25.	Terwujudnya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian sumberdaya lahan, air, sumberdaya hutan dan sumberdaya pesisir.	234.	Tersusunnya rencana rinci tata ruang 12 perkotaan dan 6 kawasan strategis	dokumen dan dokumen pengganti	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		235.	Tersusunnya RTBL	Kecamatan	Dinas Pekerjaan umum	Dinas Pekerjaan umum
		236.	Terlaksananya sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pemanfaatan ruang	kali	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah / Dinas Pekerjaan Umum	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah / Dinas Pekerjaan Umum
		237.	Meningkatnya jumlah pengurusan izin pemanfaatan (jumlah rekomendasi penerbitan IMB)	rekomendasi	Dinas Pekerjaan Umum	Dinas Pekerjaan Umum
		238.	Menurunnya jumlah pelanggaran pendirian bangunan (tidak sesuai dengan peraturan zonasi)	buah	Dinas Pekerjaan Umum	Dinas Pekerjaan Umum
		239.	Prosentase Pertambangan tanpa ijin	persen	Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan ESDM	Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan ESDM

26.	Memperkecil kemungkinan terjadinya bencana alam.	240.	Penguatan kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana (desa tangguh bencana)	desa	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		241.	Penyusunan peta resiko bencana	jenis	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		242.	Kebijakan penanggulangan bencana daerah	perda/perbup	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		243.	Penyebaran informasi potensi bencana	kali	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
27.	Menurunnya pencemaran lingkungan.	244.	Meningkatnya kemampuan daya tampung tempat pembuangan sampah	persen	Dinas Pekerjaan Umum, Kantor Lingkungan Hidup	Dinas Pekerjaan Umum, Kantor Lingkungan Hidup
		245.	Jumlah mata air yang terlindungi di daerah resapan air (mata air)	mata air	Kantor Lingkungan Hidup	Kantor Lingkungan Hidup
		246.	Jumlah desa yang melakukan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	desa	Kantor Lingkungan Hidup	Kantor Lingkungan Hidup
		247.	Restocking perairan umum (ekor)	ekor	Dinas Kelautan, Perikanan & Peternakan	Dinas Kelautan, Perikanan & Peternakan
		248.	Meningkatnya jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	persen	Kantor Lingkungan Hidup	Kantor Lingkungan Hidup
		249.	Jumlah usaha dan atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis pencegahan dan pencemaran udara (kegiatan/usaha)	kegiatan/ usaha	Kantor Lingkungan Hidup	Kantor Lingkungan Hidup
		250.	Jumlah usaha dan atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air (kegiatan/usaha)	kegiatan/ usaha	Kantor Lingkungan Hidup	Kantor Lingkungan Hidup

		251.	Jumlah luas lahan yang telah ditetapkan & diinformasikan status kerusakan tanahnya untuk produksi biomassa (ha)	ha	Kantor Lingkungan Hidup	Kantor Lingkungan Hidup
		252.	Penanganan sampah	persen	Dinas Pekerjaan Umum,Kantor Lingkungan Hidup	Dinas Pekerjaan Umum, Kantor Lingkungan Hidup
		253.	Penegakan hukum lingkungan hidup	persen	Kantor Lingkungan Hidup	Kantor Lingkungan Hidup
		254.	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal	persen	Kantor Lingkungan Hidup	Kantor Lingkungan Hidup
28.	Terwujudnya masyarakat yang tentram, dan tertib berdasarkan kesadaran hukum.	255.	Terjadinya konflik sosial	kali	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
		256.	Cakupan petugas perlindungan masyarakat (Linmas)	orang	Satuan Polisi Pamong Praja	Satuan Polisi Pamong Praja
		257.	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran	persen	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		258.	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran	persen	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		259.	Penyusunan produk hukum (perda, perbup, keputusan bupati, instruksi bupati)	buah	Bagian Hukum	Bagian Hukum
		260.	Penetapan Perda sesuai Prolegda	persen	Bagian Hukum	Bagian Hukum
		261.	Tertib administrasi kependudukan yang meliputi kepemilikan KTP, KK dan Akta Catatan Sipil	persen	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

29.	Melindungi masyarakat dari ancaman bencana.	262.	Meningkatnya pengetahuan dan kesiapsiagaan seluruh komponen dalam menghadapi bencana	Desa, Unit, Kali, Perbup, Perda	Badan Penanggulangan Bencana Daerah & semua SKPD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah & semua SKPD
		263.	Meningkatnya kapasitas penanggulangan bencana	Desa	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		264.	Pemulihan bidang fisik dan non fisik akibat bencana	kegiatan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		265.	Jumlah <i>early warning system</i> (EWS)	unit	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

B. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN KEPALA SKPD



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
SKPD

Jln. Nomor...Kabupaten Kulon Progo 55611, Telp. (0274) ..., Fax. (0274)
Email:, Website:

KEPUTUSAN KEPALA SKPD
NOMOR :TAHUN.....

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PADA SKPD

KEPALA SKPD,

- Menimbang : a. bahwa.....;
- b. bahwa.....;
- c. dan seterusnya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah;
3. dan seterusnya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SKPD TENTANG.....

- KESATU :
- KEDUA :
- KETIGA :

Ditetapkan di
Pada tanggal
KEPALA SKPD

NAMA
PANGKAT
NIP

C. FORM INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SKPD

INDIKATOR KINERJA UTAMA
SKPD.....
TAHUN 2011-2016

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

KEPALA SKPD

NAMA
PANGKAT
NIP

Petunjuk pengisian formulir Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD :

- 1. Judul diisi Nama SKPD;
- 2. Kolom (1) diisi nomor urut;
- 3. Kolom (2) diisi Sasaran sesuai Renstra SKPD;
- 4. Kolom (3) diisi Indikator Kinerja Utama sekurang-kurangnya indikator keluaran (*output*);
- 5. Kolom (4) diisi Satuan (persen, kali, orang, dan sebagainya);
- 6. Kolom (5) diisi Penanggung jawab (Unit Kerja Pengampu);
- 7. Kolom (6) diisi Keterangan.

BUPATI KULON PROGO

Cap/ttd

HASTO WARDOYO